

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai hal-hal yang mendasari penelitian, yaitu: latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembuatan skripsi.

A. Latar Belakang

Pemerintah telah berusaha untuk melakukan pemerataan pendidikan di Indonesia. Upaya yang dilakukan pemerintah yaitu mulai pada tahun 2017 merubah peraturan sistem *clustering* menjadi sistem zonasi sekolah untuk penerimaan murid (Harususilo, 2018). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerapkan program zonasi yang di dalamnya memiliki prosedur-prosedur yang tertera dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Dapodikdasmen, 2019). Menurut KBBI, zonasi adalah pembagian suatu wilayah menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan manajemen (KBBI, 2016).

Menurut Kemendikbud (2019), peraturan zonasi atau sistem zonasi adalah ketentuan yang mengatur klasifikasi zona, yang di dalamnya mengatur penerimaan murid berdasarkan radius dan jarak antara tempat tinggal dan sekolah. Sistem zonasi merupakan kebijakan penerimaan murid berbasis zonasi dapat menerima murid minimal 50 persen, jalur prestasi 0-30 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen (Kemendikbud, 2019). Sistem zonasi dirancang dengan memiliki beberapa tujuan tertentu (Putsanra, 2019).

Peraturan sistem zonasi bertujuan untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan, dengan kata lain mengharuskan pemerintah menyiapkan pemerataan sistem pelayanan dan pengelolaan pembelajaran berdasarkan standar mutu yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan (Kemendikbud, 2019). Oleh karena itu, dengan sistem zonasi diharapkan dapat melakukan percepatan pembangunan pendidikan yang merata, berkualitas, dan keadilan dalam pelayanan pembelajaran.

Nadiem Anwar Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, mengatakan sistem zonasi dimaksudkan untuk menghapus predikat sekolah favorit (Portal Informasi Indonesia, 2019). Konferensi Tahunan Wilayah Waikato (2012), menganjurkan peninjauan kebijakan zonasi untuk lebih mencerminkan konsep "sekolah terbaik sebagai sekolah lokal". Sekolah lokal yang dimaksud adalah sekolah yang berada di dekat tempat tinggal murid, yang mampu mengurangi biaya transportasi murid (Dinas Pendidikan Kota Bandung, 2019). Selain itu, dengan adanya sistem zonasi sekolah dapat meratakan kualitas pendidikan, memperbanyak sekolah favorit, meningkatkan kualitas pengajar, dan meningkatkan sarana prasarana sekolah (Fatimah, 2019). Berdasarkan tujuan sistem zonasi, terdapat perbaikan proses belajar mengajar dan perbaikan kegiatan kemuridan. Walaupun sistem zonasi memiliki tujuan yang bermanfaat, masih terdapat penilaian bahwa pelaksanaan sistem zonasi memiliki ketimpangan (Pratama & Suardita, 2019).

Terdapat evaluasi berupa penilaian yang dilakukan individu terhadap suatu sistem yang berlaku (Siu, Man, Zhang & Yau, 2013). Persepsi merupakan proses menafsirkan, menilai, menjelaskan suatu rangsang yang dibawa oleh organ indera dan otak (Feldman, 2012; Arifin, Fuady, & Kuswarno, 2017). Artinya, murid memberikan persepsi pada pelaksanaan sistem zonasi berupa penilaian.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pöder, Lauri, & Veski (2017) dan Wibawa (2019), permasalahan sistem zonasi di Kota Bandung adalah terdapat penilaian terhadap ketersediaan sekolah negeri terutama Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri belum merata (Wulandari, 2019). Hal tersebut menimbulkan sistem zonasi dipersepsikan belum mampu menghilangkan kecurangan, seperti praktik jual beli kursi, rekayasa Kartu Keluarga (KK), dan rekayasa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di penerimaan murid SMA Negeri Bandung (Wahyuni, 2019). Selain itu, SMA Negeri di Kota Bandung masih dalam status pemrosesan pemerataan segi kualitas, sehingga kualitas SMA Negeri di Kota Bandung belum merata (PikiranRakyatcom, 2020). Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada murid SMP di Kota Bandung yang masih melakukan kecurangan sehingga nilai bukan menjadi hal

yang penting baginya. Menurut Wahyuni (2019), sistem zonasi yang memprioritas jarak menyebabkan motivasi belajar murid menurun, karena nilai atau prestasi menjadi dianggap tidak penting.

Motivasi belajar merupakan faktor penting dalam sebuah pembelajaran murid, motivasi belajar adalah dorongan yang dimiliki murid guna mencapai tujuan dan cita-cita dari pembelajaran yang diperolehnya (Fauziah, Rosnaningsih, & Azhar, 2017). Motivasi belajar mendorong murid agar menguasai suatu pembelajaran yang didasari untuk mencapai tujuannya (Anggraini, 2016). Murid yang memiliki motivasi belajar akan lebih percaya diri, tidak putus asa, dan menjadikannya kompetitif, sehingga tidak takut akan kegagalan (Januariastuti, 2017). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Iswahyuni (2017) di SMP Negeri 4 Sungguminasa Kabupaten Gowa, bahwa terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar murid, menunjukkan bahwa murid yang memiliki motivasi belajar tinggi maka prestasi belajarnya pun tinggi, dan sebaliknya. Motivasi belajar ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, salah satu faktor eksternalnya yaitu lingkungan sekolah berupa sarana, prasarana, sistem di sekolah (Pamassangan, Harun, & Jamaludin, 2013). Keadilan dalam sistem sekolah pun diperlukan untuk motivasi belajar, ketika sistem sekolah yang berlaku dikatakan tidak adil dapat mengurangi motivasi belajar murid (Adam, 1965; Çelik, Saritürk, 2012). Maka, dibutuhkan sistem zonasi yang adil agar murid SMP di Kota Bandung memiliki motivasi belajar.

Terdapat tiga bentuk keadilan yaitu, keadilan distributif, keadilan prosedural, dan keadilan retributif (Adams, 1965; Gibson, 2008). Keadilan prosedural merupakan penilaian subjektif individu terhadap suatu prosedur yang berlaku, yaitu sistem zonasi (Lind & Tyler, 1988; Tyler, Blader, & Tyler, 2016; Tjahjono, 2015). Artinya, persepsi adil atau tidak, layak atau tidak layak, dinilai atas standar individu berdasarkan lingkup sosialnya dan pengambilan keputusan akan suatu hal. Persepsi keadilan prosedural ini diperlukan adanya prosedur-prosedur yang juga adil, maka individu tidak hanya memberi persepsi sistem yang ada saja, namun cara pengambilan keputusan dalam sistem tersebut juga dipersepsikan (Faturachman, 1998; Dunham, Durkin, & Tyler, 2018).

Persepsi keadilan prosedural dalam konteks pendidikan terdapat pada persepsi murid SMP di Kota Bandung terhadap peraturan sistem zonasi sekolah.

Persepsi adil atau tidak adil menjadi bagian dalam persepsi keadilan prosedural, karena persepsi keadilan prosedural tidak selamanya dilihat secara objektif apalagi absolut (Faturachman, 1998; Tjahjono, 2014). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Konovsky (2000), Cropanzano, Prehar, & Chen (2002), Lucas, Zhdanova, Wendorf, & Alexander (2013), Smith & Pettigrew (2015) mengenai keterlibatan keadilan prosedural dengan kajian psikologi kesehatan menunjukkan bahwa keadilan prosedural berpengaruh terhadap tingkat kepuasan hidup. Persepsi keadilan prosedural ini dapat memengaruhi motivasi belajar murid, dimana ketika murid mengalami persepsi ketidakadilan prosedural dapat mengurangi motivasi belajarnya (Smith & Huo, 2012). Ketika murid masih menilai terdapat kekurangan pada sistem zonasi dalam ketersediaan dan kualitas SMA Negeri yang belum merata, maka akan menimbulkan murid SMP di Kota Bandung memberi persepsi bahwa sistem zonasi tidak adil dan mampu memengaruhi motivasi belajar murid tersebut.

Sebuah laporan yang dibuat oleh Rothwell (2012) di *Brookings Institution* yang berjudul “*Housing Costs, Zoning, and Access to High-Scoring Schools*” menyebutkan bahwa di Amerika Serikat terdapat persepsi ketidakadilan pada sistem zonasi. Sama halnya seperti dalam penelitian yang dilakukan Wulandari (2018) di SMPN 1 Labuhan Ratu, penerapan sistem zonasi PPDB menimbulkan persepsi ketidakadilan karena lebih memprioritaskan jarak dibandingkan nilai. Penelitian yang dilakukan oleh Pöder, Lauri, & Veski (2017), Wibawa (2019), dan Datuk (2020) menyebutkan bahwa terdapat pemerataan murid yang berprestasi dalam sistem zonasi, namun terdapat batasan yang ditentukan oleh wilayah tempat tinggal dan ketersediaan sekolah, serta kualitas sekolah belum merata. Hal ini dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan prosedural pada sistem zonasi. Selain persepsi murid terhadap keadilan prosedural, ketidakpuasan yang terjadi pada murid terhadap cara dan sistem pembelajaran juga mampu memengaruhi motivasi belajar murid (Tan, Ibrahim, & Nur, 2014).

Murid memberikan persepsi pada sistem zonasi berupa penilaian puas atau tidak puas (Rohmatillah, 2020). Pada konteks Psikologi, mengalami

ketidakpuasan terhadap suatu kondisi disebut deprivasi relatif. Deprivasi relatif merupakan kondisi dimana individu merasa adanya kesenjangan setelah melakukan perbandingan atau penilaian sehingga membuatnya memberi persepsi tidak puas terhadap suatu kondisi (Walker & Pettigrew, 1984; Smith & Huo, 2014; Smith & Pettigrew, 2015). Greitemeyer & Sagioglou (2019) menyebutkan beberapa bentuk kondisi persepsi deprivasi relatif, yaitu kondisi-kondisi protes, marah, agresi bahkan pergerakan masa. Berdasarkan meta analisis dari Smith, dkk. (2012) dan Webber (2007), persepsi deprivasi relatif secara signifikan memengaruhi beberapa hal, seperti pencapaian atau prestasi atau penyimpangan perilaku individu, kesehatan fisik dan psikologis, bahkan dapat menjadi penyebab munculnya perilaku kolektif kelompok. Persepsi deprivasi relatif juga terjadi di *Great Conrad Upper School* Inggris, murid merasa tidak puas dengan sistem sekolah yang berlaku dan memengaruhi prestasi belajar (Yulianto, 2019). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Damaris, Surip, & Setyadi (2019) menunjukkan bahwa ketidakpuasan dapat memengaruhi motivasi belajar dan prestasi murid, ketika murid merasa tidak puas maka akan menurunkan motivasi belajar dan prestasinya.

Kesimpulan yang diambil Smith (2012) berdasarkan meta analisisnya dan menurut Stiles, Liu, & Kaplan (2000) menyebutkan persepsi deprivasi relatif menjadi suatu penilaian negatif individu dikarenakan standar-standar tertentu yang dimilikinya tidak sesuai dengan kenyataan sehingga memunculkan sikap marah dan kebencian. Maka, ketika terdapat persepsi murid SMP di Kota Bandung bahwa sistem zonasi tidak adil dapat memengaruhi motivasi, pencapaian atau prestasi, sama halnya saat mereka berada dikondisi kesenjangan atau terdapat persepsi deprivasi relatif juga akan memengaruhi motivasi belajar murid.

Dari dinamika yang telah dipaparkan mengenai sistem zonasi, motivasi belajar murid, persepsi keadilan prosedural dan persepsi deprivasi relatif maka timbulah pertanyaan, apakah pengaruh persepsi keadilan prosedural dan persepsi deprivasi relatif terhadap motivasi belajar murid dalam sistem zonasi sekolah. Sejauh ini belum ada penelitian yang mengangkat tentang permasalahan ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk

mengeksplorasi pengaruh persepsi keadilan prosedural dan persepsi deprivasi relatif terhadap motivasi belajar murid dalam sistem zonasi SMP Negeri di kota Bandung.

B. Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh persepsi keadilan prosedural terhadap motivasi belajar pada murid SMP Negeri di Kota Bandung?
2. Apakah terdapat pengaruh persepsi deprivasi relatif terhadap motivasi belajar pada murid SMP Negeri di Kota Bandung?
3. Apakah terdapat pengaruh persepsi keadilan prosedural dan persepsi deprivasi relatif terhadap motivasi belajar pada murid SMP Negeri di Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh persepsi keadilan prosedural terhadap motivasi belajar pada murid SMP Negeri di Kota Bandung,
2. Mengetahui pengaruh persepsi deprivasi relatif terhadap motivasi belajar pada murid SMP Negeri di Kota Bandung,
3. Mengetahui pengaruh persepsi keadilan prosedural dan persepsi deprivasi relatif terhadap motivasi belajar pada murid SMP Negeri di Kota Bandung.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai pengaruh persepsi keadilan prosedural dan persepsi deprivasi relatif terhadap motivasi belajar murid dalam sistem zonasi sekolah di SMP Negeri di Kota Bandung. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya keilmuan psikologi sosial dan psikologi pendidikan tentang pengetahuan mengenai persepsi keadilan prosedural, persepsi deprivasi relatif, dan motivasi belajar, serta memberikan informasi mengenai sistem zonasi sekolah.

2. Manfaat Operasional

a. Bagi Dinas Pendidikan

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar dalam membuat suatu peraturan sekolah yang adil bagi murid maupun orang tua atas prinsip-prinsip keadilan prosedural sehingga dapat mengurangi dinamika negatif yang selama ini terjadi di masyarakat.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Berikut adalah penjelasan singkat mengenai sistematika skripsi yang terdiri dari:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang yang mendasari penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas kajian pustaka yang berisi teori-teori relevan terkait dengan tujuan serta pertanyaan penelitian yang terdiri dari penjelasan mengenai persepsi, persepsi keadilan prosedural, persepsi deprivasi relatif, motivasi belajar, perkembangan masa remaja awal, dan sistem zonasi.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang berisi desain penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, instrumen penelitian, kategorisasi skala, proses pengembangan alat ukur, teknik pengambilan data, prosedur penelitian, dan analisis data terkait penelitian yang dilakukan.